

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009-2013

STEVANY HANALYNA DETHAN

Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Mataram.

email : stevany.hanalyna.dethan@gmail.com

ABSTRACT

This study is entitled Analysis on the Regional Financial Strength of Regencies/Cities in West Nusa Tenggara Province the Fiscal Year of 2009-2013. It is aimed at identifying the pattern of the mapping and pattern of the relationship of the regional financial strength.

This is an explanatory research observing regencies/cities in West Nusa Tenggara Province. Data is gathered through a case study method. Applying the techniques of documentation and library research. Data is then analyzed both quantitatively and qualitatively. For the mapping and pattern of the relationship of the regional financial strength index method.

The result of the study indicates that regencies/cities with high financial capability index (IKK) are Dompu Regency, East Lombok Regency and Sumbawa Regency. Regencies/cities with moderate IKK are Mataram City, West Lombok Regency, West Sumbawa Regency and North Lombok Regency. Regencies/cities with low IKK are Bima City, Bima Regency and Central Lombok Regency. Furthermore, it is found that regencies/cities with the patterns of relationship regional financial strength partisipative (51 percent – 75 percent)and consultative (26 percent - 75 percent). Financial strength has a positive weak. It can be concluded that the regional financial capability of West Nusa Tenggara Province for the fiscal year 2009-2013 is still low. This is indicated by the fact that the average financial strength of the region is 44.47 percent. It is accordingly suggested that regencies/cities in the province optimally seek for income resources, especially the region-based revenues, in order to cover the regional expenses and to increase the economic growth.

Keyword : Regional autonomy, financial performance, PAD and economic growth.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir-akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana pemerintah (pusat) melimpahkan sebagian wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan rumah tangganya sendiri dengan pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui potensi dan kebutuhannya. Adapun pemerintah mengeluarkan satu paket kebijakan mengenai otonomi daerah yaitu : UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Implikasi langsung dari kewenangan atau fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 ini adalah meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan untuk pengeluaran daerah. Untuk itu perlu adanya peraturan posisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kendala umum yang menjadi landasan adalah masalah kemampuan keuangan suatu daerah (*fiscal capacity*). Dari segi ini, banyak daerah otonomi belum mampu memenuhi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di daerah. Sementara itu, UU No. 33 Tahun 2004 merupakan upaya penegasan langsung kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengefisienkan fungsinya sebagai pengambil kebijakan pembangunan daerah. Maka dari itu, Undang-undang harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari PAD termasuk bagi hasil pajak, pinjaman maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan sumber utama pelaksanaan pembangunan daerah. Penerimaan daerah yang berasal dari PAD setiap tahunnya diupayakan untuk terus meningkat, karena PAD merupakan faktor penunjang utama dalam merealisasikan pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Sepuluh Kabupaten/Kota di NTB Tahun Anggaran 2009-2013 (dalam Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	PAD				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lombok Barat	38.000	88.500	114.595	103.247	121.540
2.	Lombok Tengah	28.500	63.219	66.706	68.091	70.990
3.	Lombok Timur	44.017	45.443	52.456	71.434	93.573
4.	Sumbawa	25.972	41.111	43.957	66.755	69.285
5.	Dompu	15.625	18.513	25.409	31.072	36.421
6.	Bima	20.024	23.052	43.094	61.446	69.219
7.	Kota Mataram	36.046	41.580	52.511	65.562	90.150
8.	Kota Bima	9.728	9.763	11.486	12.078	17.276
9.	Sumbawa Barat	22.631	36.526	122.934	98.120	41.458
10.	Lombok Utara	6.768	10.000	17.287	25.000	35.286

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id)

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada dua Kabupaten/Kota yang mengalami fluktuasi PAD dari tahun ke tahun yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan Depalapan Kabupaten/Kota lainnya setiap tahun mengalami peningkatan PAD. PAD sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB setiap tahunnya yang memiliki PAD tertinggi adalah tiga Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2009, Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2010, 2012 dan 2013 dan Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2010.

Relatif kecilnya penerimaan PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB disebabkan oleh kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan masih terbatas dibandingkan dengan potensi yang ada. Target PAD seringkali dilakukan dengan pendataan dan proyeksi. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah analisis secara mendalam terhadap sumber-sumber PAD. Upaya menganalisis secara detail dan mendalam yang dilakukan secara optimal dapat dijadikan suatu strategi untuk menghasilkan sumber-sumber pendapatan daerah secara umum dan PAD khususnya. Dalam meningkatkan pendapatan daerah berbagai macam usaha telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu intensifikasi dengan meningkatkan penerimaan yang sudah ada dan ekstensifikasi yaitu memperluas sumber-sumber pendapatan yang ada dan menggali potensi sumber pendapatan yang baru.

Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Propinsi Nusa Tenggara Barat, juga diberikan wewenang baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pemberian wewenang tersebut, maka masing-masing Kabupaten/Kota ini dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk digunakan sebagai modal pembangunan dan dijadikan sumber pendapatan daerahnya. Pemberian wewenang dalam bidang keuangan daerah tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota dalam mengelola keuangan daerahnya. Karena dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, maka pemerintah Kabupaten/Kota akan mampu meningkatkan kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga daerah dapat membiayai seluruh kebutuhan daerahnya baik untuk kebutuhan belanja aparatur maupun kebutuhan belanja publik.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan hukum perencanaan dan penganggaran daerah dapat dijelaskan bahwa proses penganggaran pada akhirnya bermuara pada APBD. APBD seharusnya menjadi alat kebijakan fiskal daerah untuk mempengaruhi pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, pengelolaan perencanaan dan penganggaran daerah harus memiliki suatu target anggaran yang layak. Target anggaran yang ditujukan peningkatan kinerja pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik. Belanja APBD memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun di sisi yang lain dapat berdampak *inflatoir*. Karenanya, belanja APBD yang berlebihan dapat meningkatkan jumlah defisit APBD jika tidak dapat diimbangi dengan pendapatan APBD.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola peta kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB 2009-2013?
2. Bagaimanakah pola hubungan kemampuan keuangan daerah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB 2009-2013?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola peta kemampuan keuangan daerah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB 2009-2013.
2. Untuk mengetahui pola hubungan kemampuan keuangan daerah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB 2009-2013.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai metode dalam meneliti suatu obyek atau peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis mengenai sifat-sifat hubungan antar fenomena serta dapat ditarik kesimpulannya (Nasir, 2005).

Metode penelitian yang sesuai adalah metode khusus, yaitu suatu metode penelitian dengan penuluran data sekunder yang bersumber dari dinas instansi terkait, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat ditelusuri melalui internet

Alat analisis yang digunakan adalah metode indeks untuk mengetahui pola peta kemampuan keuangan daerah dan pola hubungan kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun anggaran 2009-2013. Metode indeks diukur melalui Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) (Bappenas, 2003). Untuk mengetahui IKK dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran share, growth dan elastisitas :

$$SharePAD = \frac{PAD_t}{TotalBelanja} \times 100\% \quad 1)$$

$$GrowthPAD = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\% \quad 2)$$

$$Elastisitas = \frac{GrowthPAD}{PertumbuhanEkonomi} \quad 3)$$

$$PertumbuhanEkonomi = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad 4)$$

Keterangan :

PAD_t : Pendaptan Asli Daerah tahun t

PAD_{t-1} : Pendapatan Asli Daerah tahun t-1

$PDRB_t$: Produk Domestik Regional Bruto t

$PDRB_{t-1}$: Produk Domestik Regional Bruto t-1

- 2) Menyusun Indeks untuk setiap komponen Indeks Kemampuan Keuangan. Indeks ini diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut :

$$IndeksX = \frac{NilaiXhasilpengukuran - NilaiXkondisi minimum}{NilaiXkondisimaksimum - NilaiXkondisi minimum} \quad 5)$$

- 3) Dari persamaan 5), kemudian dihitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang diperoleh dari persamaan berikut (Bappenas, 2003) :

$$IKK = \frac{X_S + X_G + X_E}{3} \quad 6)$$

Keterangan : X_S : Indeks *Share* PAD terhadap Belanja, X_G : Indeks *Growth* (Pertumbuhan PAD)

X_E : Indeks Elastisitas Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- 4) Menyusun peta kemampuan keuangan daerah berdasarkan IKK yang diperoleh dari persamaan 6). Berdasarkan range IKK tertinggi dan IKK terendah, kemudian disusun peta kemampuan keuangan yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah, yang berpedoman pada Halim (2001) :

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemampuan (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	26 - 50	Konsultatif
Sedang	51 - 75	Partisipatif
Tinggi	76 - 100	Delegatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Pola peta kemampuan keuangan daerah merupakan gambaran umum kemampuan keuangan daerah. Analisis yang digunakan untuk melihat pola peta kemampuan keuangan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode indeks. Dimana, metode indeks dapat diukur dengan kinerja PAD, yaitu *share* PAD terhadap belanja, *growth* PAD dan elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi fiskal (dalam otonomi daerah) ditujukan untuk menciptakan kemandirian daerah. Sidik (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dapat diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi daerahnya (keuangan lokal), khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Share merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. *Growth* merupakan angka pertumbuhan PAD tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.

Tabel 3. Rata-rata *Share* PAD, *Growth* PAD dan Elastisitas PAD Sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2009-2013 (dalam persen)

No.	Kabupaen/Kota	<i>Share</i> PAD	<i>Growth</i> PAD	Elastisitas PAD
1.	Lombok Barat	11,97	33,70	6,80
2.	Lombok Tengah	6,47	27,95	4,74
3.	Lombok Timur	5,39	22,39	4,11
4.	Sumbawa	6,51	24,22	3,82
5.	Dompu	4,71	18,39	2,93
6.	Bima	5,25	33,57	5,77
7.	Kota Mataram	8,54	22,76	3,86
8.	Kota Bima	2,79	24,27	4,18
9.	Sumbawa Barat	10,47	51,34	-2,36
10.	Lombok Utara	4,84	51,60	11,71
Rata-rata		6,69	31,02	4,14

Sumber : Data diolah

Tabel 3 menunjukkan rata-rata setiap tahun *share* PAD terhadap total belanja daerah paling tinggi adalah Kabupaten Lombok Barat yaitu sebesar 11,97 persen dan yang paling rendah adalah Kota Bima yaitu sebesar 2,79 persen. Sedangkan rata-rata *share* PAD terhadap belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sebesar 6,69 persen. Rata-rata setiap tahun *growth* PAD Kabupaten/Kota paling tinggi adalah Kabupaten Lombok Utara yaitu sebesar 51,60 persen dan yang paling rendah adalah Kabupaten Dompu yaitu sebesar 18,39 persen. Sementara itu, rata-rata *growth* PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sebesar 31,02

persen. Elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, yang memiliki rata-rata elastisitas di atas satu adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, kecuali Kabupaten Sumbawa Barat. Rata-rata tiap tahun elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah Kabupaten Lombok Utara yaitu sebesar 11,71 persen dan yang paling rendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar -2,36 persen. Rata-rata elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dari Pada sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2009-2013, yaitu sebesar 4,14. Dimana, keadaan ini menunjukkan bahwa elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dari satu (elastis), yang artinya bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi melebihi perubahan pertumbuhan PAD setiap tahunnya.

Setelah diketahui hasil dari masing-masing nilai indeks, maka dapat dilakukan analisis Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).

Tabel 4. Indeks Kemampuan Keuangan Pada Sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	INDEKS			IKK	IKK (%)
		X_S	X_G	X_E		
1.	Lombok Barat	0,71	0,31	0,29	0,4367	43,67
2.	Lombok Tengah	0,60	0,22	0,22	0,3467	34,67
3.	Lombok Timur	0,49	0,58	0,57	0,5467	54,67
4.	Sumbawa	0,56	0,41	0,38	0,4500	45,00
5.	Dompu	0,58	0,53	0,67	0,5933	59,33
6.	Bima	0,53	0,30	0,32	0,3833	38,33
7.	Kota Mataram	0,48	0,47	0,39	0,4467	44,67
8.	Kota Bima	0,28	0,44	0,48	0,4000	40,00
9.	Sumbawa Barat	0,39	0,37	0,51	0,4233	42,33
10.	Lombok Utara	0,46	0,33	0,47	0,4200	42,00
Rata-rata		44,47				

Sumber : Data Diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa, kemampuan keuangan yang dilihat dengan menggunakan metode indeks, nilai Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) daerah yang paling tinggi adalah Kabupaten Dompu yaitu sebesar 59,33 persen. IKK yang paling rendah adalah Kabupaten Lombok Tengah yaitu 34,67 persen, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah belum dapat mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Rata-rata IKK pada delapan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sebesar 44,47 persen. Berdasarkan range IKK tertinggi dan terendah, kemudian disusun peta kemampuan keuangan yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 5. Pola Peta Kemampuan Keuangan Daerah Pada Sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	Indek Kemampuan Keuangan (%)	Status Kemampuan Keuangan
1	Dompu	59,33	Tinggi
2	Lombok Timur	54,67	Tinggi
3	Sumbawa	45,00	Tinggi
4	Kota Mataram	44,67	Sedang
5	Lombok Barat	43,67	Sedang
6	Sumbawa Barat	42,33	Sedang
7	Lombok Utara	42,00	Sedang
8	Kota Bima	40,00	Rendah
9	Bima	38,00	Rendah
10	Lombok Tengah	34,67	Rendah

Sumber : Data Diolah

Tabel 5 menunjukkan bahwa, dengan menggunakan metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada delapan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang mempunyai IKK tinggi, yaitu Kabupaten Dompu,

Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa, sedangkan yang mempunyai IKK sedang yaitu, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu yang mempunyai IKK rendah, yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah.

Kabupaten/Kota yang berada pada kategori tinggi, dapat diartikan bahwa Kabupaten/Kota tersebut sudah dapat mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimilikinya. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada pada kategori sedang, sudah dapat menggali potensi yang dimiliki, tetapi belum secara optimal. Sementara itu, yang berada pada kategori rendah Kabupaten/Kota tersebut belum dapat mengoptimalkan potensi/kekayaan yang dimilikinya, maka daripada itu perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang paling penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode indeks dilihat dengan menggunakan pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan dalam Halim (tabel 2).

Tabel 6. Kemampuan Keuangan Daerah Pada Delapan Kabupaten/kota di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2009-2013 (dalam persen)

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kemampuan Keuangan (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
1.	Lombok Barat	43,67	Rendah	Konsultatif
2.	Lombok Tengah	34,67	Rendah	Konsultatif
3.	Lombok Timur	54,67	Sedang	Partisipatif
4.	Sumbawa	45,00	Rendah	Konsultatif
5.	Dompu	59,33	Sedang	Partisipatif
6.	Bima	38,33	Rendah	Konsultatif
7.	Kota Mataram	44,67	Rendah	Konsultatif
8.	Kota Bima	40,00	Rendah	Konsultatif
9.	Sumbawa Barat	42,33	Rendah	Konsultatif
10.	Lombok Utara	42,00	Rendah	Konsultatif

Sumber : Data Diolah

Tabel 6 menunjukkan bahwa ada dua Kabupaten/Kota yang berada pada pola hubungan kemampuan keuangan partisipatif yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Timur. Pola hubungan partisipatif yaitu bahwa peran pemerintah semakin berkurang, mengingat kemandirian daerah semakin tinggi. Sementara itu, delapan Kabupaten/Kota lainnya berada pada pola hubungan kemampuan keuangan konsultatif. Pola hubungan konsultatif yaitu bahwa peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, kemandirian keuangan pemerintah daerah sedikit mampu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola peta kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode indeks menunjukkan bahwa : Kabupaten/Kota yang mempunyai IKK tinggi, yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. IKK sedang yaitu, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten

sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara. IKK rendah, yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok

2. Pola hubungan kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB menunjukkan bahwa : ada dua Kabupaten/Kota yang berada pada pola hubungan kemampuan keuangan partisipatif yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan delapan Kabupaten/Kota lainnya berada pada pola hubungan kemampuan keuangan konsultatif.

Saran-saran

1. Daerah yang berada IKK sedang, perlu mendapat dorongan agar PAD-nya tumbuh, disertai belanja daerah yang rasional sesuai kemampuan riil yang dimiliki daerah. Bagi daerah yang berada IKK rendah, tampaknya perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan PAD-nya. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, agar pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota dapat memenuhi belanja daerahnya.
2. Belanja daerah memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika belanja daerah dilakukan secara berlebihan, akan dapat menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Untuk mengurangi defisit anggaran, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengimbangi antara belanja daerah dengan pendapatan daerah.
3. Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dituntut untuk lebih optimal dan menggali seluruh potensi-potensi yang ada di daerahnya yang merupakan aset/kekayaan daerah, sehingga akan meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Adapun cara untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Halim, Abdul, 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP YKPN.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Jhingan, M. L, 1994. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT Rajda Grafindo Persada. Jakarta.
- Nataluddin, 2001. Potensi Dana Perimbangan pada Pemerintahan di Daerah Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. UPP YKPN. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.